

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai suatu bahan untuk membandingkan dan sebagai pedoman penelitian sekarang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Aryani, Werastuti, & Adipura (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping desa lokal dan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi aparatur desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kepala desa, bendahara desa, pendamping lokal desa dan pengurus BPD. Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dimana terdapat 29 desa di Kabupaten Buleleng yang bermasalah dalam laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan II sehingga dana desa pada tahap III terancam tidak dicairkan. Teknik analisis data pada penelitian ini yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah

desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa, dan keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan pada variabel independen yang digunakan oleh penelitian sekarang dan terdahulu yaitu keterlibatan masyarakat desa (partisipasi masyarakat) dan kompetensi pemerintah desa (pendamping desa).
- b. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sekarang dan terdahulu menggunakan regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen efektivitas kinerja pendamping lokal desa.
- b. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 29 desa di Kabupaten Buleleng, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

2. Aprilya & Fitria (2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan variabel pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel pada penelitian ini adalah 100

sampel yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Teknik pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis antar variabel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada:

- a. Variabel independen pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan partisipasi masyarakat, transparansi, komitmen, dan kompetensi.
- b. Pengujian penelitian menggunakan pengujian hipotesis dimana hal ini untuk menguji keterkaitan antar variabel.
- c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel pada penelitian terdahulu yaitu berada di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

3. Julianto & Dewi (2019).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan variabel partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa, komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan

dana desa. Sampel pada penelitian ini yaitu tertuju kepada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan operator siskeudes di Kabupaten Buleleng. Teknik pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis antar variabel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan partisipasi masyarakat, kompetensi pendamping desa, dan komitmen pemerintah daerah.
- b. Pengujian penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan pengujian hipotesis dimana hal ini untuk menguji keterkaitan antar variabel.
- c. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel sistem keuangan desa, tetapi menggunakan variabel transparansi.
- b. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah berfokus pada kepala desa, sekretaris desa, serta operator siskeudes di Kabupaten Buleleng, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

4. Wafirotin & Septiviasuti (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisa tentang pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan variabel pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan *coefficient of determination*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terdapat pada :

- a. Variabel independen pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan transparansi dan partisipasi masyarakat
- b. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.
- c. Pengujian pada penelitian terdahulu dan sekarang menguji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen akuntabilitas.
- b. Sampel penelitian terdahulu berfokus pada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

5. Umar, Usman, & Purba (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa dan implementasi kualitas laporan keuangan desa. Variabel yang digunakan adalah pengaruh pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa dan implementasi kualitas laporan keuangan desa. Sampel pada penelitian adalah 10 desa di Kabupaten Gane Barat, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode validitas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terdapat pada :

- a. Variabel yang digunakan menggunakan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia (kompetensi pendamping desa).
- b. Pengujian pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan hipotesis dimana hal ini untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu terletak pada :

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen pengendalian internal dan tidak menggunakan variabel dependen implementasi kualitas laporan keuangan desa.

- b. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan metode validitas, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.
- c. Sampel yang difokuskan juga berbeda pada penelitian terdahulu berfokus pada masyarakat di 10 desa di Provinsi Maluku Utara, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

6. Mada, Kalangi, Gameliel (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi aparat pengelola dana desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Variabel yang digunakan adalah pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi aparat pengelola dana desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Sampel pada penelitian ini adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen menggunakan kompetensi aparat desa, komitmen organisasi aparat desa, dan partisipasi masyarakat baik pada penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang.

- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan uji hipotesis untuk menguji adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- c. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda baik pada penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan sampel aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel apar pemerintah daerah tepatnya yaitu 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- b. Variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa pada penelitian sekarang tidak digunakan.

7. Andriani, M (2019).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Variabel yang digunakan adalah pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 113 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel dan menggunakan analisis data yaitu uji validitas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan menggunakan partisipasi masyarakat baik pada penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menguji hipotesis, dimana dalam hal ini bermaksud untuk mencari adanya pengaruh variabel independen dan dependen.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen pada penelitian sekarang tidak menggunakan transparansi dan akuntabilitas.
- b. Teknik analisis data penelitian terdahulu dan sekarang berbeda, karena penelitian terdahulu menggunakan analisis data validitas sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.
- c. Sampel yang digunakan juga berbeda pada penelitian terdahulu mengarah kepada masyarakat asli desa Luk yang sedang menempuh S1, D3, D2, dan D1, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel aparat pemerintah desa di 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

8. Rezeki, E. S (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa. Variabel yang digunakan adalah pengaruh tingkat pendidikan, kompetensi aparatur, komitmen organisasi,

dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan dana desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah daerah pengelola di Kecamatan Tambakromo. Sampel pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kasi pembangunan dari 18 desa di Kecamatan Tambakromo. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen menggunakan kompetensi aparatur (pendamping desa) dan komitmen organisasi (pemerintah daerah).
- b. Penelitian terdahulu dan sekarang menguji hipotesis, dimana hal ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh antar variabel.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu penelitian sekarang yaitu terdapat pada :

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen tingkat pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Sampel yang digunakan juga berbeda, pada penelitian terdahulu sampelnya adalah 18 desa di Kecamatan Tambakromo. Sedangkan pada penelitian sekarang sampelnya adalah 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

- c. Teknik analisis yang digunakan juga berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan analisis deskripsi dan regresi moderasi, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

9. Purnawati, Adnyani (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Variabel yang digunakan adalah peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Sampel pada penelitian ini adalah 168 perangkat desa dari 56 desa di Kabupaten Buleleng. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen menggunakan kompetensi pendamping desa dan komitmen aparatur desa (pemerintah daerah).
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menguji hipotesis, karena dengan uji hipotesis maka akan terlihat pengaruh antar variabel.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu sampelnya adalah 168 perangkat desa dari 56 desa di Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk penelitian saat ini sampelnya adalah 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

- b. Teknik analisis pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

10. Nurkhasanah (2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus di desa kecamatan Pancur kabupaten Rembang). Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel pada penelitian ini adalah 75 responden atau pihak pengelola dana desa. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen menggunakan kompetensi aparatur (pendamping desa) dan partisipasi masyarakat.
- b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menguji hipotesis, karena dengan uji hipotesis maka akan terlihat pengaruh antar variabel.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu terletak pada :

- a. Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen pemanfaatan teknologi.
- b. Sampel yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu sampelnya adalah 168 perangkat desa dari 56 desa di Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk penelitian saat ini sampelnya adalah 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- c. Teknik analisis pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

11. Ratu, Sari, Putri (2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya kepemimpinan, budaya organisasi, spiritualitas pada kinerja penyusunan LAKIP dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Variabel yang digunakan adalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, spiritualitas pada kinerja penyusunan LAKIP dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Sampel pada penelitian ini adalah 80 orang di Kabupaten Sumba Tengah. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah regresi moderasi. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, sedangkan variabel budaya organisasi dan spiritual tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Variabel independen menggunakan spiritual.

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menguji hipotesis, karena dengan uji hipotesis maka akan terlihat pengaruh antar variabel.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu sampelnya adalah 80 pemerintah desa di Kabupaten Sumba Tengah, sedangkan untuk penelitian saat ini sampelnya adalah 18 desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
- b. Teknik analisis pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi moderasi, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.
- c. Penelitian saat ini tidak menggunakan variabel independen gaya kepemimpinan dan budaya organisasi.

TABEL 2.1

MATRIK RESEARCH GAP

| No. | Nama Peneliti | Tahun Artikel | Kinerja Pendamping Lokal Desa | Partisipasi Masyarakat | Penggunaan Sistem Keuangan Desa | Transparansi | Akuntabilitas | Komitmen Pemerintah Daerah | Pengendalian Internal | Tingkat Pendidikan | Kompetensi Pendamping Desa | Pemanfaatan | | Spiritual | Gaya | | Budaya |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----|-----------|--------------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | Teknologi Informasi | | | Kepemimpinan | Organisasi | |
| 1 | Aryani, Werasuti, & Adipura | 2020 | B | B | | | | | | | B | | | | | | |
| 2 | Aprilya & Fitria | 2020 | | TB | | TB | | B | | | B | | | | | | |
| 3 | Julianto & Dewi | 2019 | | B | B | | | B | | | B | | | | | | |
| 4 | Wafrotin & Septiastuti | 2019 | | B | | B | B | | | | | | | | | | |
| 5 | Umar, Usman, & Purba | 2019 | | | | | | | B | | B | | | | | | |
| 6 | Mada, Kalangi, Gameliel | 2019 | | B | | | | B | | | B | | | | | | |
| 7 | Andriani, M | 2019 | | B | | B | B | | | | | | | | | | |
| 8 | Rezeki, E. S | 2019 | | | | | | TB | | B | B | B | | | | | |
| 9 | Purnawati, Aduyani | 2019 | | | | | | B | | | B | | B | | | | |
| 10 | Nurkhasanah | 2019 | | TB | | | | | | | TB | B | | | | | |
| 11 | Ratu, Sari, Putri | 2019 | | | | | | | | | | | TB | B | | | TB |

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah

Keterangan: TB = Tidak Berpengaruh

B = Berpengaruh

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Werastuti, & Adipura (2020), Julianto & Dewi (2019), Wafirotin & Septiviasuti (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), Andriani (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian juga dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2020) dan Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wafirotin & Septiviasuti (2019) dan Andriani (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian juga dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2020) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2020), Julianto & Dewi (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), dan Purnawati & Adnyani (2019) menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, namun berbeda dengan penelitian Rezeki (2019) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Werastuti, & Adipura (2020), Aprilya & Fitria (2020), Julianto & Dewi (2019), Umar, Usman, & Purba (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), Rezeki (2019), dan Purnawati & Adnyani (2019) menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan menurut penelitian Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh

Purnawati & Adnyani (2019) menyatakan bahwa spiritual berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Namun menurut penelitian Ratu, Sari, & Putri (2019) menyatakan bahwa spiritual tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006; dan Thorton, 2009) dan *non profit* lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006; dan Wilson, 2010) sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principals*. Pemerintah desa bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*principals*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik atau masyarakat.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat Pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban. Wewenang, tugas, dan kewajiban kepala desa adalah untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa; melaksanakan pembangunan; pembinaan kemasyarakatan; dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi dari kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa; melaksanakan pembangunan; pembinaan masyarakat; pemberdayaan masyarakat; serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang dibantu oleh unsur staf sekretaris desa. Kedudukan sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sekretaris desa sebagai unsur pimpinan/koordinator sekretaris desa, secara umum membawahi staf sekretariat desa yang terdiri atas kepala urusan keuangan desa, kepala tat usaha dan umum, serta kepala urusan perencanaan. Tugas sekretaris desa adalah memabntu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Selain tugas tersebut, sekretaris desa juga bertugas mengoordinasikan penyusunan, perubahan, pelaksanaan, pertanggung jawaban kebijakan APBD serta melakukan verivikasi

terhadap DPA, DPPA, DPAL, dan RAK Desa. Fungsi sekretaris desa adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan, dan melaksanakan urusan perencanaan.

3. Bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa

Kepala urusan keuangan desa (bendahara) merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa. Kedudukan bendahara atau kepala urusan keuangan desa dalam keuangan desa adalah sebagai pelaksana Fungsi Kebendaharaan dalam struktur PPKD. Tugas dari bendahara atau kepala urusan keuangan desa adalah membantu sekretaris desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa, menyusun RAK Desa, serta melakukan penatausahaan yang berkaitan dengan kas desa. Bendahara atau kepala urusan keuangan desa mempunyai fungsi dalam melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4. Kepala Tata Usaha dan Umum

Kepala tata usaha dan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala tata usaha dan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau sekretaris desa. Fungsi kepala urusan tata usaha dan umum, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan; melaksanakan administrasi surat menyurat; melaksanakan

arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa; melaksanakan penataan administrasi perangkat desa; penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor; penyiapan rapat-rapat, pengadministrasian aset desa; pengadministrasian investaris desa; pengadministrasian perjalanan dinas; serta melaksanakan pelayanan umum.

5. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Tugas lain dari kepala urusan perencanaan adalah melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau sekretaris desa. Fungsi dari kepala urusan perencanaan adalah mengkoordinasikan urusan perencanaan desa; menyusun RAPBD; menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa; melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa; menyusun RPJMD dan RKPD; menyusun laporan kegiatan desa; serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala deksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa. Kepala seksi pemerintahan juga mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai tugasnya; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berbeda dalam bidang tugasnya; menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas pelaksanaan APBD; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Fungsi kepala seksi pemerintahan, yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; menyusun rancangan regulasi desa; pembinaan masalah pertanahan; pembinaan ketentraman dan ketertiban; pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat; kependudukan; penataan dan pengelolaan wilayah; serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa di bidang kesejahteraan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas pokok kepala seksi kesejahteraan adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berbeda dalam bidang tugasnya; menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Fungsi kepala seksi kesejahteraan adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas warga desa. Tugas pokok kepala seksi pelayanan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBD; melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa; menyiapkan dokumen anggaran kas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Fungsi kepala seksi pelayanan, yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa; meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa; melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat desa; serta melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, rujuk, kelahiran, dan kematian.

9. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat desa yang dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan syarat jika kegiatan di desa tersebut tidak dapat dilakukan sendiri baik sifat dan jenisnya oleh PKA atau kepala seksi sesuai bidang tugasnya. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusunnya. Fungsi kepala dusun, yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; melaksanakan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2.2.3. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga atau masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. 2019). Tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa, yaitu tahap pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam keberhasilan pengelolaan dana

desa. Tahap kedua adalah pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan desa, dalam tahap ini partisipasi masyarakat dapat berupa tenaga dalam bentuk membantu kegiatan yang diadakan oleh desa, berupa pikiran, dan lainnya. Tahap ketiga adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa, hal ini dapat dilihat pada laporan realisasi APBD setiap periodenya.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program dalam pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan partisipasi masyarakat jika dihubungkan dengan teori *stewardship* dalam penyusunan rencana anggaran daerah sangat penting. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu anggota dewan legislatif dalam penyusunan anggaran daerah, karena masyarakatlah yang mengetahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh karena itu partisipasi masyarakat diperlukan dalam penyusunan anggaran.

2.2.4 Transparansi.

Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi

yang terkait dengan pengelolaan dana desa, keputusan pemerintah desa, dan prosedur itulah yang akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa.

Implikasi teori *stewardship* jika dikaitkan dengan transparansi yaitu prinsip keterbukaan dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai *stewards* dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola sumberdaya publik kepada masyarakat (*principal*) untuk mendapatkan informasi dengan seluas-luasnya tanpa adanya keterbatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah baik berupa penyajian laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang diperlukan oleh *principal* demi tercapainya kepuasan bagi pengguna informasi (*principal*).

2.2.5 Komitmen Pemerintah Daerah.

Komitmen pemerintah desa merupakan pengaruh terbesar dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dalam hal ini harus memperkuat komitmennya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Komitmen pemerintah desa merupakan bagian dari revolusi mental yang harus diterapkan oleh para perangkat di setiap desa. Saat ini sudah bukan waktunya lagi para pemerintah desa atau aparatur desa hanya datang ke kantor sekedar duduk-duduk tanpa adanya suatu tujuan dan kemudian pulang (Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. 2019).

Komitmen pemerintah daerah disini memegang peran penting khususnya pada bidang pengelolaan dana desa jika pada laporan realisasi APBD terjadi kecurangan maka pemerintah daerah sudah tidak mempunyai komitmen dalam hal pelaksanaan tugasnya. Jika komitmen pemerintah daerah sangat peduli maka akan

membantu untuk keberhasilan pengelolaan dana desa, tetapi jika komitmen pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat maka tidak akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan variabel ini dengan teori *stewardship* adalah jika komitmen pemerintah daerah yang bertindak sebagai *stewards* terlalu tinggi maka akan tercapai suatu keberhasilan. Keberhasilan tersebut akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat *prinsipal* karena pengelolaan dana desanya telah berhasil.

2.2.6 Kompetensi Pendamping Desa.

Peran SDM dalam perusahaan atau organisasi mempunyai arti yang penting, sehingga interaksi antara organisasi dan SDM menjadi fokus perhatian pemimpin. Kompetensi dalam hal ini adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya (Specer, 1993). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kompetensi SDM dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi. SDM dalam hal ini adalah pendamping desa yang memiliki peran penting untuk mencapai suatu tujuan desa yaitu untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa. Kinerja individu dapat optimal apabila individu tersebut memiliki kompetensi yang handal dibidangnya (Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. 2019). Akhirnya jika kompetensi SDM (pendamping desa) handal maka hal tersebut akan mempengaruhi kemajuan atau keberhasilan pada suatu organisasi disini maka akan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

Kompetensi seorang pendamping desa sangat mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Artinya semakin kompeten perangkat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel atau semakin kompeten pemerintah desa maka akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan variabel ini dengan teori *stewardship* adalah dalam organisasi publik, peran pendamping desa yang bertindak sebagai *steward* lebih ditekankan pada kemampuan dalam hal suatu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang bertindak sebagai *principal*, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel di mata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap organisasi menjadi sangat penting dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.2.7 Spiritual

Spiritual merupakan suatu sikap dasar manusia untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan harga dirinya serta prinsip memiliki yang tinggi. Suatu keadaan dimana manusia dalam kesadarannya dapat terhubung langsung dengan sang Pencipta (repository.radenintan.ac.id/). Spiritual dapat diartikan juga sebagai suatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang sesuai dengan kepercayaannya, misalnya integritas diri (kejujuran) serta komitmen terhadap pekerjaannya. Bila nilai-nilai agama dapat ditanamkan dalam setiap individu terkait pengambil keputusan, dalam hal ini kuasa pengelola anggaran, tidak akan melakukan penyimpangan.

Spiritual yang tinggi akan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Jika spiritual seseorang pemerintah desa lemah maka keberhasilan

pengelolaan dana desa tidak akan terjadi. Keterkaitan teori *Stewardship* yaitu dalam pemerintah desa. Pemerintah desa bertindak sebagai *steward* lebih ditekankan pada spiritual dalam pengelolaan dana desa yang dapat membuat masyarakat yang bertindak sebagai *principal* percaya terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa akan memiliki reputasi yang tinggi di mata masyarakat, jika pemerintah desa melakukan tugasnya sesuai dengan spiritual yang dimilikinya.

2.3 Pengaruh Variabel

2.3.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga atau masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. 2019). Partisipasi masyarakat adalah indikator terpenting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu keberhasilan pengelolaan dana desa menuju kearah yang lebih baik lagi. Peran dan kinerja pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat serta membina perekonomian desa.

Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transparansi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Pelibatan masyarakat atau

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program pembangunan desa menjadi kunci akan keberhasilan pengelolaan dana desa, sehingga partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan partisipasi masyarakat jika dihubungkan dengan teori *stewardship* dalam penyusunan rencana anggaran daerah sangat penting. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu anggota dewan legislatif dalam penyusunan anggaran daerah, karena masyarakatlah yang mengetahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh karena itu partisipasi masyarakat diperlukan dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Werastuti, & Adipura (2020), Julianto & Dewi (2019), Wafirotin & Septiviasuti (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), Andriani (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.3.4 Pengaruh Transparansi Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Aprilya & Fitria, 2020). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana

masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Peran pemerintah dalam hal ini adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Aprilya & Fitria, 2020).

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka mengenai APBDesa kepada masyarakat. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Transparansi yang terkait dengan pengelolaan dana desa, keputusan pemerintah desa, dan prosedur itulah yang akan membantu keberhasilan pengelolaan dana desa.

Implikasi teori *stewardship* jika dikaitkan dengan transparansi yaitu prinsip keterbukaan dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai *stewards* dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola sumberdaya publik kepada masyarakat (*principal*) untuk mendapatkan informasi dengan seluas-luasnya tanpa adanya keterbatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah baik berupa penyajian laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang diperlukan oleh *principal* demi tercapainya kepuasan bagi pengguna informasi (*principal*). Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafirotn & Septivastuti (2019) dan Andriani

(2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.3.5 Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen organisasi adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, untuk terlibat dalam proses kegiatan sebuah organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Komitmen pada dasarnya adalah merupakan kesediaan seseorang untuk mengikatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu dalam memberikan loyalitas dan mempunyai niat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Apabila pendamping desa tidak berjalan secara optimal pada salah satu desa, maka jalan lainnya yang ditempuh oleh desa yaitu dengan mengundang para praktisi dan akademisi untuk datang ke desanya dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi, hingga pendampingan.

Wujud komitmen pemerintah daerah untuk ikut membantu pemerintah desa memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa saat ini cukup signifikan. Bentuk kepedulian pemerintah daerah saat ini, misalnya pemda mengadakan pelatihan tata kelola keuangan desa, memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem informasi desa, dan lainnya. Semangat UU Desa merupakan wujud dari komitmen pemerintah mendorong otonomi desa.

Wujud komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa dapat berupa pemberian pembinaan, pelatihan serta pengawasan dalam hal penggunaan dana desa, sehingga komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan variabel ini dengan teori *stewardship* adalah jika komitmen pemerintah daerah yang bertindak sebagai *stewards* terlalu tinggi maka akan tercapai suatu keberhasilan. Keberhasilan tersebut akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat *prinsipal* karena pengelolaan dana desanya telah berhasil. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2020), Julianto & Dewi (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), dan Purnawati & Adnyani (2019) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.3.6 Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan. Kompetensi adalah sesuatu yang berhubungan dengan sikap, watak kepribadian dan pengetahuan yang diperolehnya. Peran pendamping desa diperlukan dalam pengawasan penggunaan dana desa walaupun pengelolaan keuangan di desa sudah diawasi

dengan adanya Siskeudes. Seseorang agar mendapatkan kinerja tinggi secara maksimal seharusnya antara kompetensi individu yang dimiliki, harus sesuai atau cocok dengan dengan kompetensi jabatan yang diembannya, hal ini akan mengakibatkan atau terjadi kecocokan dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimilikinya. Implementasi UU desa, pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan membina perangkat desa dalam segala pekerjaan teknis yang ada di desa.

Kompetensi seorang pendamping desa sangat mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Semakin kompeten perangkat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel, sehingga kompetensi pendamping desa sangat penting dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan variabel ini dengan teori *stewardship* adalah dalam organisasi publik, peran pendamping desa yang bertindak sebagai *steward* lebih ditekankan pada kemampuan dalam hal suatu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang bertindak sebagai *principal*, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel di mata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap organisasi menjadi sangat penting dalam hal keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryani, Werestuti, & Adipura (2020), Aprilya & Fitria (2020), Julianto & Dewi (2019), Umar, Usman, & Purba (2019), Mada, Kalangi, & Gameliek (2019), Rezeki (2019), dan Purnawati & Adnyani (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.3.7 Pengaruh Spiritual terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

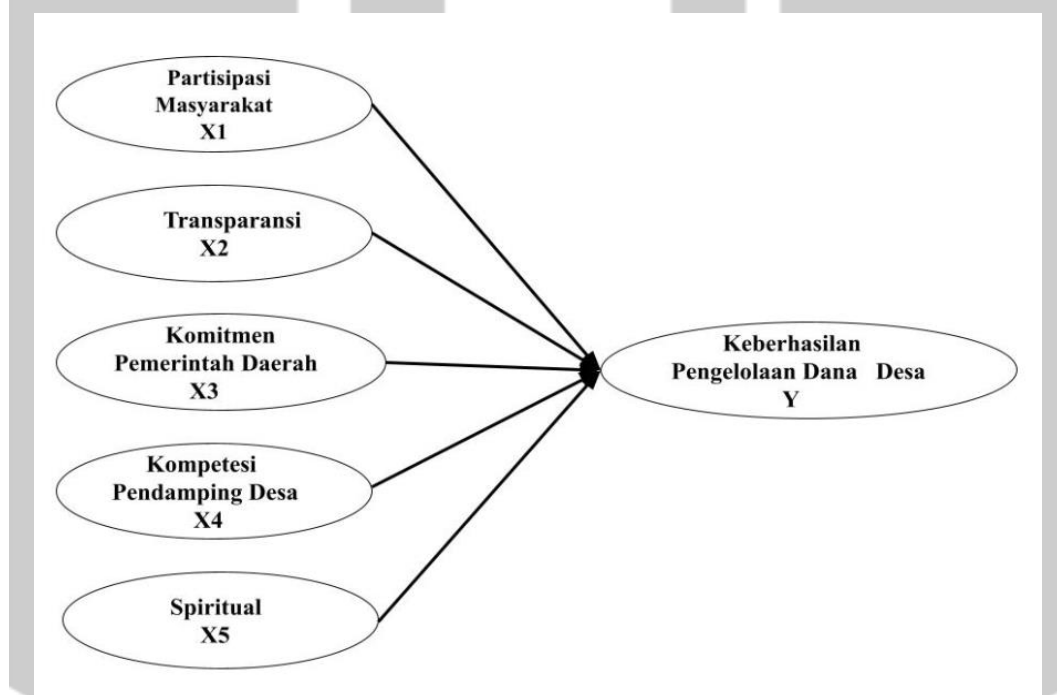
Spiritual merupakan praktik individu, dan ada hubungannya dengan memiliki rasa damai dan tujuan. Spiritual merupakan suatu sikap dasar manusia untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan harga dirinya serta prinsip memiliki yang tinggi. Suatu keadaan dimana manusia dalam kesadarannya dapat terhubung langsung dengan sang Pencipta. Spiritual dapat diartikan juga sebagai suatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang sesuai dengan kepercayaannya. Ini berkaitan dengan integritas diri dan komitmen dalam pekerjaan seseorang. Variabel ini penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa, karena jika terjadi penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan tersebut disebabkan oleh lemahnya faktor mental atau psikologis yang bersumber dari nilai-nilai instrumental yang dianut sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk berpikir singkat melalui jalan pintas (Munidewi, 2017; Nirban, 2018).

Jika nilai keagamaan atau spiritual pemerintah daerah kuat maka akan terjadi suatu keberhasilan pengelolaan dana desa. Jika nilai keagamaan atau spiritual pemerintah daerah lemah maka tidak akan terjadi suatu keberhasilan pengelolaan dana desa. Keterkaitan teori *Stewardship* yaitu dalam pemerintah desa. Pemerintah desa bertindak sebagai *steward* lebih ditekankan pada spiritual dalam pengelolaan dana desa yang dapat membuat masyarakat yang bertindak sebagai *principal* percaya terhadap pemerintah desa. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnawati & Adnyani (2019) yang

menyatakan bahwa spiritual berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.4 Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mendasari penelitian bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, komitmen pemerintah daerah serta kompetensi pendamping desa. Kerangka pemikiran dapat digambarkan untuk mempermudah memahami pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang digambar sebagai berikut:



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

H₁: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

H₃: Komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

H₄: Kompetensi pendamping desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

H₅: Spiritual berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.